ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA BASIS AKRUAL TAHUN 2014 - 2015

Fathiyah[1], Masnun[2]

Abstract

The purpose of this study is to analyze the financial performance of Jambi Provincial Government in the regional financial statements before and after the implementation of accrual basis in 2014 and 2015. The result of the research shows that the financial performance of Jambi Provincial Government as measured by liquidity ratio, solvency ratio and leverage ratio are still in good category and within safe limits because value of all the ratio is above industry standard, although in 2015 there is a decrease in all value ratio because in that year the Jambi Provincial Government has applied the accrual basis in presenting the financial statements so that there is a decrease in the asset post that is in the post of current assets due to allowance for receivables and on the post of fixed assets due to depreciation of fixed assets. Decrease in asset value automatically leads to a decrease in its financial performance.

Keywords : financial performance, financial ratio, accrual basis

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu instansi karena Faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu instansi terletak dalam kinerja keuangannya, karena dari kinerja keuangan tersebut dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuhsuatu instansi sudah tepat atau belum, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan Instansi sudah baik atau tidak.

Kinerja keuangan dari suatu instansi dapat menentukan berhasil atau tidaknya instansibersangkutan. Fungsi dari pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai alat bantu bagi manajemen di instansi dalam proses pengambilan keputusan, juga untuk memperlihatkan kepada investor maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa instansi tersebut mempunyai kredibilitas yang baik.

Pemerintah Provinsi Jambi adalah salah satu instansi yang juga menerapkan fungsi keuangan, walaupun sebagai instansi non profit yang tidak mencari keuntungan karena orientasinya adalahuntuk pelayanan publik yang lebih baik tetap saja dituntut untuk mempunyai kinerja keuangan yang baik karenadengan kinerja keuangan yang baik artinya sama dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalammembiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, disamping itu juga untuk pertanggungjawaban dan transparansi publik.

Setiap akhir tahun Pemerintah Provinsi Jambi menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun kepada pihak pemangku kepentingan dan salah satu bentuk laporan dan pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk untuk menganalisis

[1] Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
[2] Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

kinerja keuangan pemerintah daerah maka neraca adalah sebagai salah satu komponen dari Laporan Keuangan yang sangat penting dalam melakukan perhitungan kinerja keuangan tersebut,dan data yang ada pada pos-pos dalam neraca ini kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio leverege (utang)

Penelitian ini ditekankan pada analisis perhitungan rasio keuanganpada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada periode dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 untuk melihat Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada saat sebelum diterapkannya Sistim Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual (sebelumnya masih menerapkan basis Kas menuju Akrual) yaitu dengan menggunakan neraca keuangan tahun 2014 dan pasca penerapan Akuntansi berbasis akrual yaitu dengan menggunakan neraca keuangan tahun 2015.

Perbedaan basis pencatatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah menyebabkan ada beberapa perbedaan yang muncul dalam beberapa pos yang ada pada neraca daerahdan secara otomatis akan berimbas pula pada kinerja keuangan Pemerintah daerah dalam periode dua tahun tersebut. Perbedaan penyajian Laporan Keuangan (Neraca) sebelum dan setelah diterapkannya basis akrual dapat dilihat pada tabel neraca Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015 berikut ini.

Tabel 1, Pemerintah Provinsi Jambi Neraca
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1.	ASET		
	ASET LANCAR	477.729.819.138,96	835.669.608.650,82
	Kas	217.697.239.558,99	511.810.658.045,73
	Piutang Daerah	6.250.449.690,25	14.243.830.607,73
	Penyisihan Piutang	(1.338.798.576,79)	0
	Beban Diayar dibayar di Muka	531.343.107,00	538.235.361,00
	Persediaan	254.589.585.359,51	309.076.884.636,36
	INVESTASI JANGKA PANJANG	304.076.094.502,57	322.840.987.700,95
	Investasi Non Permanen	12.321.730.504,81	35.118.133.821,95
	Investasi Permanen	291.754.363.997,76	287.722.853.879,00
	ASET TETAP	3.701.672.055.790,85	6.519.502.730.168,17
	Total Aset Tetap	7.216.099.983.228,65	6.519.502.730.168,17
	Akumulasi Penyusutan	(3.514.427.927.437,80)	0
	ASET LAINNYA	906.698.353.541,58	839.742.370.997,40
	Total Aset Lainnnya	912.565.536.286,40	839.742.370.997,40
	Akumulasi Amortisasi	(4.723.031.824.37)	0
	Akumulasi Penyusutan	(1.114.150.920.45)	0
2.	KEWAJIBAN	136.802.405.618,32	154.868.341.572,07
	Kewajiban Jk. Pendek	136.802.405.618,32	154.868.341.572.07
	Kewajiban Jk. Panjang	0	0
3.	EKUITAS	5.253.373.917.355,64	8.362.887.355.945,27
	Ekuitas Dana Lancar		680.801.267.078,75
	Ekuitas Dana Investasi		7.682.086.088.866,52
	Ekuitas Dana Cadangan		0

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaannya terutama pada sisi aset baik aset lancar maupun aset tetap diamana pada tahun 2014 tidak ada pos Penyisihan piutang sedangkan pada tahun 2015 karena sudah menerapkan basis akrual maka rekening tersebut muncul dan dilakukan perhitungan besaran penyisihannya, Hal yang sama juga terlihat pada aset tetap dan aset lainnnya dimana pada tahun 2014 belum ada pos rekening akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sedangan pada tahun 2015 sudah ada dan lansung dilakukan perhitungan penyusutan dan amortisasinya. Penambahan pos rekening ini menyebabkan terjadi penurunan jumlah total aset lancar, aset tetap dan aset lainnya pada tahun 2015 sehingga berpengaruh pada laporan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada dua tahun terakhir tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, disini penulis dapat merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang diukur dengan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio leverege (utang) pada Laporan keuangan Pemerintah daerah sebelum diterapkannya basis akrual pada tahun 2014 dan pasca diterapkannya basis akrual pada tahun 2015.

Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang diukur dengan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio leverage (utang) pada laporan keuangan Pemerintah daerah sebelum diterapkannya basis akrual pada tahun 2014 dan pasca diterapkannya basis akrual pada tahun 2015.

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kualitatif dengan cara menggunakan teori-teori yang berdasarkan pada buku-buku panduan dan konsep-konsep yang ditentukan , sehingga diperoleh gambaran yang dibahas dan metode kuantitatif dengan cara menganalisis data yang dibutuhkan pada penelitian yaitu data keuangan atau analisis terhadap neraca Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan Pemerintah Provinsi JambiTahun 2014-2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau badan perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha/perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance)*dan kinerja non keuangan (*nonfinancial performance).* Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki perusahaan/badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balancesheet*(neraca), *income statement*(laporan laba rugi), dan *cash flow statement* (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian *financial performance* tersebut (Irham Fahmi, 2011: 2).

Menurut Irham Fahmi (2011: 2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard

an ketentuan dalam SAK (Standar Akuntasi Keuangan) atau GAAP (*General Acepted Accounting Principle*), dan lainnya

Menurut Munawir (2000: 31), dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah:

a. Likuiditas, adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
b. Solvabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan*solvable* apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *insolvable*.
c. Rentabilitas atau *profitability*, adalah kemampuan menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Stabilitas usaha, adalah menunjukan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya dan membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Menurut Martono dan Harjito (2005 : 51), analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi.

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2008 : 56), analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Mahmudi (2016 ; 9) fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada phak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Namun tidak semuua pengguna laporan keuangan memahaki akuntansi sebagai alat untuk menghasilkan laporan keuangan sehinggga untuk memahami dan menginterpretasikannya perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksud untuk membantu bagaimana menfsirkan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi suatu kesatuan usaha.

Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: manajer perusahaan, pemilik perusahaan, bankir, kreditor, investor, pemerintah dan lembaga lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-

undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah daerah sedikit berbeda dengan laporan keuangan perusahan, adapun komponen laporan keuangan Pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Peubahan Saldo Anggaran Lebih
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Informasi aset dalam neraca sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu, ada beberapa rasio keuangan yang kurang relevan untuk sektor publik karena berhubungan dengan laba sedangkan pada sektor publik tidak tersedia informasi laba , sehingga rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio leverage (Mahmudi, 2016)

1. Rasio Likuiditas

   Adapun jenis rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ;

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Working Capital to Total Aset} = \frac{\text{Aktiva Lancar - Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Rasio Solvabilitas

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

3. Rasio utang (leverage)

   Adapun jenis rasio *leverage* yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini antara lain:

$$\text{Rasio utang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset Modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dengan menggunakan rasio keuangan maka diperole hasil seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015

Rasio Keuangan	2014	2015
Rasio Likuiditas		
Rasio Lancar	5,3 : 1	3,4 : 1
Rasio Kas	3,3 : 1	1,5 : 1
Rasio Cepat	3,4 : 1	1,6 : 1
Rasio Working Capital to Total Aset	0,107 : 1	0,06 : 1
Rasio Solvabilitas	54,9 : 1	39,4 : 1
Rasio Utang		
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,01 : 1	0,02 : 1
Rasio Utang terhadap Aset Modal	0,02 : 1	0,03 : 1

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015, Data diolah

Rasio Lancar menunjukkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk menutupi hutangnya, nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 : 1. Untuk Provinsi Jambi Rasio Lancar tahun 2014 adalah 5,3 : 1, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 3,4 : 1 penurunan rasio ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015 sudah menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga ada penurunan nilai pada sisi aset yaitu penurunan jumlah aset lancar dikarenakan adanya penyisihan piutang dan pada aset tetap dikarenakan adanya penyusutan aset tetap.

Walaupun terjadi penurunan pada nilai aset untuk tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 214 tetapi nilai rasionya masih dianggap aman artinya keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada dua tahun tersebut masih dalam kategori lancar. Penurunan ini juga otomatis berimbas pada rasio likuiditas lainnya, rasio solvabilitas dan rasio leveregenya.

Rasio Kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Provinsi Jambi dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Untuk Provinsi Jambi rasio kasnya pada tahun 2014 adalah 3,3 : 1 dan pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 1,5 : 1, walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya Pemerintah Provinsi Jambi dapat memnuhi utangnya yang harus segera dipenuhi.

Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik, rasio ini bermanfaat untuk Pemerintah daerah dalam membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menujukkan berapa alat likuiditas yang digunakan untuk melunasi utang lancar. Untuk Provinsi Jambi tahun 2014 rasio cepatnya sebesar 3,4 : 1, tetapi pada tahun 2015 enurun menjadi sebesar 1,6 : 1. Walapun terjadi penurunan rasio ini masih pada batas aman, semakin tinggi rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan Pemerintah daerah.

Working Capital to Total Aset Ratio adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi kerja netto. Analisis modal kerja ini

bermanfaat untuk menilai kecukupan keuagan pemerintah dalam memenihi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Semakin tinggi modal kerja maka likuiditas organisasi semakin baik.

Rasio modal kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 adalah 0,107 : 1 dan terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,06 : 1, walaupun terjadi penurunan pada tahun ini namun likuiditas organisasi (Pemerintah Provinsi Jambi) masih dalam kategori aman.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas untuk Provinsi Jambi pada tahun 2014 adalah 54,9 : 1 dan pad tahun 2015 menurun menjadi sebesar 39,4 : 1, walaupun terjadi penurunan tetapi dalam dua tahun tersebut Pemerintah Provinsi Jambi secara keuangan sangat likuid dan solvabel bahkan dapat dikatakan terlalu likuid (over likuid).

Rasio utang (leverage ratio) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerh dalam membuat keputusan pemberian kredit, rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Komponen dari rasio utang ini adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset modal.

Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang, rasio utang yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (over leverage) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar. Untuk Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014 rasionya adalah 0.01 : 1 dan ada sedikit peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar .02 : 1, namun besaran rasio tersebut masih relatif sangat kecil sehingga masih dalam batas aman.

Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal dalam hal ini yang diproksikan, Rasio utang terhadap aset modal Provinsi Jsmbi pada tahun 2014 adalah 0,02 : 1 dan ada sedikit peningkatan pada tahun 2015 menjadi 0,03 : 1, rasio ini juga masih relatif sangat kecil dan masih kategori batas aman.

Rasio utang ini sebenarnya tidak relevan untuk sektor publik karena asumsinya jika terjadi likuidasi kreditor tidak bisa mengklaim aset modal pemerintah jika ada kegagalan pembayaran dalam membayar utang karena kreditor tidak dapat mempailitkan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014 dan 2015 berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas, rasio ini menunjukkan kinerja keuangan Pmerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014 dan 2015 dalam kategori baik dan masih dalam batas aman, walaupun ada penurunan nilai rasio pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2104, tetapi untuk rasio lancar, rasio kas, rsio cepat dan rasio modal kerja

nilainya masih diatas rata-rata industri, ini artinya keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dikategorikan likuid.

2. Rasio solvabilitas, rasio ini juga menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jsmbi pada tahun2014 dan 2015 baik dan masih dalam batas aman, walaupun ditahun 2015 terjadi penurunan ditahun 2015 tetapi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi masih dalam kategori likuid dan solvabel
3. Rasio utang, rasio ini juga menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014 dan 2015 dalam kategori baik dan dalam batas aman. Walaupun terjadi peningkatan nilai rasio ditahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014 namun nilainya masih realtif sangat kecil sekali.
4. Penurunan semua nilai rasio keuangan pada tahun 2015 tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun tersebut sudah menerapkan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan sehingga terjadi penurunan jumlah dan nilai pada sisi aset yaitu penurunan nilai pada aset lancar karena adanaya penyisihan piutang dan penurunan nilai pada aset tetap karena adanya penyusutan aset tetap. Penurunan nilai aset ini otomatis menyebabkan penurunan pada kinerja keuangannya.

Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja keuangan keuangannya Pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah sehingga dengan pengelolaan daerah yang baik akan meningkatkan kenerja pemerintah daerah yang lebih baik.
2. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan efisinsi dalam penggunaan anggaran daerah dan lebih fokus penggunaan anggaran untuk investasi sehingga dapat menambah aset pemerintah daerah seperti investasi dalam pembangunan infra s struktur sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan:Panduan Bagi Akademisi, Manajer, dan Investor Untuk Menilai dan menganalisa Bisnis Dari Aspek Keuangan*. Cetakan Kesatu. ALFABETA. Bandung.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. UPP
STIM YKPN,Yogyakarta

Martono dan D. Agus Harjito. 2001. *Manajemen Keuangan.*Edisi Pertama. EKONISIA Kampus Fakultas Ekkonomi UII. Yogyakarta.

Munawir, Slamet. 1983. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Kedua Cetakan Pertama. LIBERTY.Yogyakarta.

Prastowo,Dwi dan Juliaty, Rifka. 2008. *Analisis Laporan Keuangan.* Edisi Kedua. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.

Sadeli , Lili M. 2011. *Dasar – dasar Akuntansi.* Bumi Aksara.Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jambi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015.